



# **RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**



**RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO  
PURWOKERTO**

|          | DAFTAR ISI                                                | HAL.  |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------|
|          | DAFTAR ISI                                                | 1     |
|          | LEMBAR PERNYATAAN                                         | 2     |
| BAB I.   | PENDAHULUAN                                               | 3     |
|          | 1.1. LATAR BELAKANG                                       | 3     |
|          | 1.2. LANDASAN HUKUM                                       | 4-5   |
|          | 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN                                    | 6     |
|          | 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN                                | 6-7   |
| BAB II.  | HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023                           | 8     |
|          | 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN<br>RENSTRA PD | 8-12  |
|          | 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN                           | 13    |
|          | 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN<br>FUNGSI  | 14-21 |
|          | 2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD                    | 21-23 |
|          | 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN<br>MASYARAKAT  | 24    |
| BAB III. | TUJUAN DAN SASARAN                                        | 25    |
|          | 3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL                   | 25-27 |
|          | 3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD                          | 27-28 |
|          | 3.3. MANAJEMEN RESIKO STRATEGIS PD                        | 28-29 |
| BAB IV.  | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN                               | 30    |
|          | 4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD TH 2025               | 30-34 |
|          | 4.2. MANAJEMEN RESIKO PROGRAM DAN KEGIATAN PD<br>TH 2025  | 35-38 |
| BAB V.   | PENUTUP                                                   | 39    |

**LEMBAR PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2025 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2025.

Purwokerto, 9 September 2024

Direktur

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



Dr. dr. Harsini, Sp.P, MMR)

NIP. 19700205 200011 2 001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 ayat (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 2 dan pasal 11, disebutkan bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi RKPD, RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah (OPD), dan Renja Perangkat Daerah OPD. Berkenaan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2023, serta berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026. Serta difokuskan untuk mendukung Kebijakan Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah 2025 yaitu **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”** dengan prioritas daerah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan
- b. berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
- d. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
- e. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah (Renja OPD) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto untuk periode tahun 2025 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan

aspirasi masyarakat di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan RENJA RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2025 berpedoman pada Tema Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rancangan awal RPD Tahun 2025 Provinsi Jawa Tengah, dan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan **“Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari”** serta memperhatikan bagai dinamika kebijakan Nasional yang berkaitan dengan sumber daya manusia, insfrastruktur dan pelayanan dasar, serta mendukung perwujudan agenda pembangunan nasional meliputi:

- a. Transformasi sosial;
- b. Transformasi ekonomi;
- c. Transformasi tata kelola;
- d. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan indonesia;
- e. Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi;

dengan implementasi kebijakan kewilayahan serta sarana dan prasarana, yang didukung dengan kerangka implementasi berupa kaidah pelaksanaan (kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, kerangka pendanaan dan investasi' serta kerangka pengendalian dan evaluasi).

Dalam Renja PD Tahun 2025 juga harus memuat faktor risiko yang disusun dalam kerangka manajemen risiko sampai level risiko operasional perangkat daerah dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko diLingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai bentuk implementasi kebijakan perencanaan berbasis risiko atau riskbased planning.

Penyusunan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan, review ranca awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Kesehatan. Dilaksanakan di masing-masing bidang dan bagian.

Tahun Anggaran 2025 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2024-2026, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- B. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- C. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- D. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- G. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- H. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- I. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- J. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- K. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- L. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- M. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- N. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 119 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
- O. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- P. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
- Q. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 059/80/X/2008 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
- R. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah.
- S. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Keuangan Daerah.
- T. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 000.7/0001788 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud ditetapkannya Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yaitu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dan sesuai dengan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dan rancangan awal Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto 2024-2026;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- b. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin terciptanya pelayanan sesuai dengan SPM.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat gambaran umum penyusunan Renja yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

#### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah**

Memuat rewiu terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 bekaitan dengan realisasi program kegiatan yang tercapai/tidak tercapai, faktor penyebab ketidak tercapaian, implikasi dan kebijakan cara mengatasi faktor penyebab.

#### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi; Tujuan dan sasaran Renja dan Manajemen Risiko Strategis PD.

#### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan, menejemen risiko**

program dan kegiatan tahun 2025.

## Bab V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2023**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Capaian Renstra PD.**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksanaan.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto s/d Tahun 2023 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo memiliki 2 (dua) Sasaran yaitu : Sasaran 1 Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian dengan indikator kinerja Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan indikator kinerja Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo memiliki 2 Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan adalah sebagaimana tersebut dalam uraian berikut :

- a. Realisasi Program / Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Yang Direncanakan : Nihil
- b. Realisasi Program / Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Yang direncanakan adalah :  
Dari 2 Program dan 3 Kegiatan yang direncanakan semua tercapai sesuai target yang ditetapkan.
- c. Realisasi Program / Kegiatan Yang Melebihi Target Yang Direncanakan Adalah 1 Program dan 1 kegiatan.
- d. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

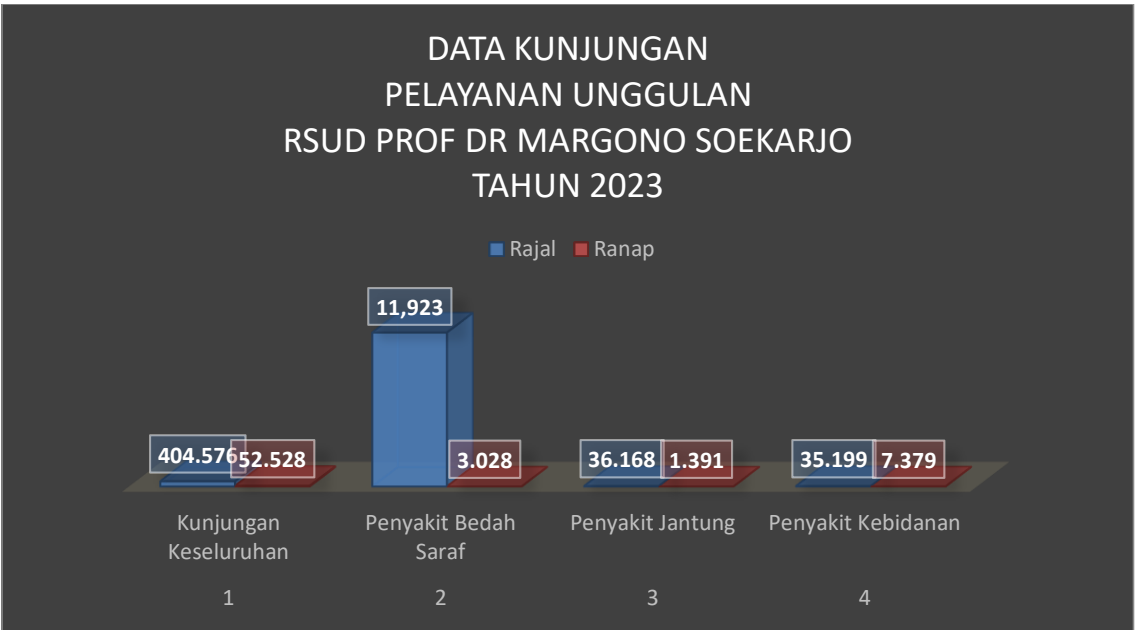
Diputusnya 3 RS sekitar oleh BPJS berdampak pada pemindahan layanan pasien ke RSMS yang berpengaruh pula pada peningkatan belanja BLUD, dengan demikian target belanja meningkat, akan tetapi target CRR parsial dan total menjadi tidak tercapai, karena belanja BLUD lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan yang ada.

- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra adalah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo lebih dipercaya oleh masyarakat, hal ini dibuktikan dengan anggaran dan realisasi penyerapan anggaran, tingginya kunjungan pasien di tahun 2023 yang ditunjang dengan berkembangnya jenis penyakit pada layanan unggulan RS. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Dari data diatas dapat dilihat bahwa realisasi belanja APBD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun Anggaran 2023 semuanya diatas 90%, termasuk juga penyerapan anggaran pada Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan pelayanan untuk opsional RS khususnya untuk menunjang pelayanan cukup tinggi, meskipun terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 39.879.420.962,-.



Dari data diatas dapat dilihat bahwa kunjungan terbesar pada rawat inap berdasarkan unggulan RS adalah pasien penyakit kebidanan.

**10 Besar Kasus Penyakit Tahun 2021**  
**Sesuai Unggulan Renstra PD 2018-2023**

| NO | ICD10  | DESKRIPSI BEDAH SARAF                                           | JUMLAH |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | S06.40 | Epidural haemorrhage, without open intracranial wound           | 107    |
| 2  | S06.00 | Concussion, without open intracranial wound                     | 97     |
| 3  | D32.0  | Benign neoplasm: Cerebral meninges                              | 90     |
| 4  | S06.20 | Diffuse brain injury, without open intracranial wound           | 83     |
| 5  | S06.50 | Traumatic subdural haemorrhage, without open intracranial wound | 57     |
| 6  | S06.30 | Focal brain injury, without open intracranial wound             | 48     |
| 7  | I62.0  | Subdural haemorrhage (acute)(nontraumatic)                      | 44     |
| 8  | C71.9  | Malignant neoplasm: Brain, unspecified                          | 44     |
| 9  | G91.1  | Obstructive hydrocephalus                                       | 44     |
| 10 | I61.5  | Intracerebral haemorrhage, intraventricular                     | 42     |

| NO | ICD10 | DESKRIPSI PENYAKIT JANTUNG                                    | JUMLAH |
|----|-------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | I21.0 | Acute transmural myocardial infarction of anterior wall       | 80     |
| 2  | I21.4 | Acute subendocardial myocardial infarction                    | 75     |
| 3  | I48   | Atrial fibrillation and flutter                               | 71     |
| 4  | I50.0 | Congestive heart failure                                      | 65     |
| 5  | I21.1 | Acute transmural myocardial infarction of inferior wall       | 59     |
| 6  | I20.0 | Unstable angina                                               | 32     |
| 7  | I11.0 | Hypertensive heart disease with (congestive) heart failure    | 32     |
| 8  | i51.7 | Cardiomegaly                                                  | 22     |
| 9  | I25.9 | Chronic ischaemic heart disease, unspecified                  | 17     |
| 10 | I11.9 | Hypertensive heart disease without (congestive) heart failure | 17     |

| NO | ICD10 | DESKRIPSI KASUS MATERNAL                                                     | JUMLAH |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | O14.9 | Pre-eclampsia, unspecified                                                   | 302    |
| 2  | C53.9 | Malignant neoplasm: Cervix uteri, unspecified                                | 271    |
| 3  | O13   | Gestational [pregnancy-induced] hypertension without significant proteinuria | 169    |
| 4  | O61.0 | Failed medical induction of labour                                           | 164    |
| 5  | C56   | Malignant neoplasm of ovary                                                  | 154    |
| 6  | D70   | Agranulocytosis                                                              | 150    |
| 7  | O34.2 | Maternal care due to uterine scar from previous surgery                      | 143    |
| 8  | O42.0 | Premature rupture of membranes, onset of labour within 24 hours              | 124    |
| 9  | O14.1 | Severe pre-eclampsia                                                         | 118    |
| 10 | O68.9 | Labour and delivery complicated by fetal stress, unspecified                 | 91     |

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perargkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah

| No | Urusan/Bidang<br>Urusan Pemerintah Daerah dan<br>Program/Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja<br>Program (Outcome)<br>Kegiatan (Output)                                                                                    | Satuan | Target Kinerja<br>Akhir<br>Capaian<br>Program/Kegiatan<br>(Renstra PD)<br>Tahun<br>2018-2023 | Realisasi<br>Target<br>Kinerja Hasil<br>Program dan<br>Keluaran<br>Kegiatan<br>sampai<br>dengan<br>tahun 2022 | Target dan Realisasi Kinerja<br>Program dan Kegiatan<br>Tahun 2023 |                       |                             | Target<br>Program<br>dan<br>Kegiatan<br>(Renja PD<br>Tahun<br>2024 | Perkiraan Realisasi Capaian<br>Target Renstra PD sd. Tahun<br>2024             |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |        |                                                                                              |                                                                                                               | Target<br>Renja PD                                                 | Realisasi<br>Renja PD | Tingkat<br>Realisasi<br>(%) |                                                                    | Perkiraan<br>Realisasi<br>Capaian<br>Target<br>Renstra PD<br>sd. Tahun<br>2024 | Tingkat<br>Capaian<br>Realisasi<br>Target<br>Renstra PD<br>(%) |
| 1  | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                              | 4      | 5                                                                                            | 6                                                                                                             | 7                                                                  | 8                     | 9                           | 10                                                                 | 11                                                                             | 12                                                             |
|    | Urusan Pemerintahan                                                                                                                          |                                                                                                                                                |        |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                    |                       |                             |                                                                    |                                                                                |                                                                |
|    | Bidang Kesehatan                                                                                                                             |                                                                                                                                                |        |                                                                                              |                                                                                                               |                                                                    |                       |                             |                                                                    |                                                                                |                                                                |
|    | <b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>                                                           | <b>Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan</b>                                                          |        | <b>100%</b>                                                                                  | <b>100%</b>                                                                                                   | <b>100%</b>                                                        | <b>100%</b>           | 100%                        | 100%                                                               | 35,00                                                                          | 35,00                                                          |
|    | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi |        | 100%                                                                                         | 100%                                                                                                          | 100%                                                               | 100%                  | 100%                        | 100%                                                               | 35,00                                                                          | 35,00                                                          |
|    | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                                    | Jumlah paket pemenuhan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan                                                         |        | 2 paket                                                                                      | 1 paket                                                                                                       | 2 paket                                                            | 2 paket               | 100%                        | 1paket                                                             | 76,00                                                                          | 76,00                                                          |
|    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>                                                                           | <b>Persentase SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang terlatih</b>                                                                                |        | <b>40%</b>                                                                                   | <b>30%</b>                                                                                                    | <b>40%</b>                                                         | <b>40%</b>            | 100%                        | 20%                                                                | 19%                                                                            | 95,00                                                          |
|    | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                           | Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan                                                              |        | 5 kegiatan                                                                                   | 5 kegiatan                                                                                                    | 5 kegiatan                                                         | 5 kegiatan            | 100%                        | 5 kegiatan                                                         | 100                                                                            | 100                                                            |

|  |                                                                                                                          |                                                                                |  |             |             |             |             |      |            |           |       |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------------|-----------|-------|
|  | Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan                                                     | Jumlah SDM Kesehatan dan non kesehatan yang mengikuti diklat                   |  | 720 orang   | 540 orang   | 720 orang   | 720 orang   | 100% | 360 Orang  | 535 orang | 98,06 |
|  | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>                                                                  | <b>Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat</b> |  | <b>40%</b>  | <b>20%</b>  | <b>40%</b>  | <b>40%</b>  | 100% | 100        | 100       | 100   |
|  | Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat     |  | 1800 orang  | 1500 orang  | 1800 orang  | 1800 orang  | 100% | 3 Kegiatan | 100       | 100   |
|  |                                                                                                                          |                                                                                |  |             |             |             |             | 100% | 3 Dokumen  | 100       | 100   |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                                                      | <b>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD</b>     |  | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | <b>100%</b> | 100% | 100%       | 75,00     | 75,00 |
|  | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                          | Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah              |  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 12 Laporan  | 100% | 12 Laporan | 9         | 75    |
|  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                        | Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN                     |  | 12 bulan    | 12 bulan    | 12 bulan    | 12 bulan    | 100% | 12 bulan   |           |       |
|  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>                                                                      | <b>CRR Total</b>                                                               |  | <b>81%</b>  | <b>78%</b>  | <b>81%</b>  | <b>81%</b>  | 100% | 82         | 76,17     | 92,89 |
|  | Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                               | CRR Parsial                                                                    |  | 95%         | 90%         | 95%         | 95%         | 100% | 96         | 89,93     | 93,68 |
|  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                                                                   | Capaian realisasi fisik kegiatan                                               |  | 87%         | 86%         | 87%         | 87%         | 100% |            |           |       |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Kajian capaian kinerja pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto memberi gambaran target dan capaian pelayanan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 2.3  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

| No  | Indikator                                          | SPM/<br>Standar<br>Nasional | IKK  | Target Renstra<br>PD |       | Realisasi<br>Capaian | Realisasi<br>Proyeksi | Catatan<br>Analisis |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------------|-------|----------------------|-----------------------|---------------------|
|     |                                                    |                             |      | 2023                 | 2024  | 2023                 | 2024                  |                     |
| (1) | (2)                                                | (3)                         | (4)  | (6)                  | (7)   | (10)                 | (11)                  | (12)                |
| 1.  | Angka Harapan Hidup (AHH)                          | 74.1                        | 74.1 | 74.72                | 74,6  | 74.72                | 74.72                 | Sudah tercapai      |
| 2.  | Prosentase capaian standar pelayanan minimal (SPM) |                             |      | 90.00                | 90,26 | 90.00                | 90.00                 | Sudah tercapai      |
| 3.  | Zona Integritas (WBK/WBB M)                        |                             |      | -                    | -     | -                    | -                     |                     |
| 4.  | Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)                    |                             |      | 85,5                 | 89,49 | 87                   | 87                    | Sudah tercapai      |
| 5.  | Nilai SAKIP                                        |                             |      | -                    | -     | -                    | -                     |                     |

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto**

1. Isu-isu penting dari perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo Purwokerto

Memasuki Tahun Anggaran 2025 secara nasional maupun lokal, kita masih dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan di bidang kesehatan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS.
- 2) Belum mantapnya sistem rujukan pelayanan kesehatan di Jawa Tengah
- 3) Belum cukupnya rasio tenaga medis dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien
- 4) Meningkatnya status sosial ekonomi masyarakat mendorong perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang berkualitas yang berbasis teknologi kedokteran canggih
- 6) Tingginya kesadaran masyarakat tentang akses dan sistem pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, terjangkau dan transparan
- 7) Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat
- 8) Cepatnya perubahan regulasi yang terkait dengan pengembangan sistem informasi
- 9) Rendahnya minat tenaga kesehatan melakukan penelitian klinis sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan
- 10) Permasalahan aksesibilitas pelayanan dalam rangka penurunan AKI dan Stunting
- 11) Meningkatnya Kasus Stunting dan merupakan program nasional dalam bidang Kesehatan dalam rangka penanganan dan pencegahan stunting
- 12) Pengembangan pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dan jejaring pelayanan Kardiovaskuler intervensi dan neuro intervensi (Pelayanan Stroke Intervensi)

Sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan bidang kesehatan merupakan komponen penting untuk mendorong produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila kondisi kesehatan manusia terjaga, maka dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan kesehatan dilakukan melalui promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dimana sebagai upaya pencegahan terhadap kejadian kesakitan upaya yang dilakukan adalah promotif dan preventif.

Dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat diperlukan upaya peningkatan derajat kesehatan yang baik, diawali dari lingkup keluarga melalui fase kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia). Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain



kecukupan asupan gizi, kesadaran dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran diri dalam deteksi dini penyakit.

Hal lain yang sangat berpengaruh adalah Kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, dan konsumsi alkohol menjadi faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular di Jawa Tengah. Melansir berita Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kesehatan pada tahun 2019, dimana tiga PTM teratas adalah hipertensi sebanyak 68,8 persen, diabetes melitus 13,4 persen dan obesitas 5,5 persen. Peningkatan PTM tidak saja menimbulkan dampak ekonomi tapi juga mengakibatkan penurunan produktifitas karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif yang biasanya datang ke pelayanan kesehatan dalam stadium yang lanjut, dan selebihnya tidak menyadari jika dirinya menderita PTM.

Kecenderungan ini terlihat dari masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin, yaitu perenam bulan. Disamping kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan cepat saji serta kurang berolahraga.

Sementara sisi lain masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran yang cukup tentang pelayanan kesehatan terutama daerah terpencil dan perifer menjadi persoalan yang cukup berarti hal ini berakibat pada masih tingginya angka kematian ibu dan angka kematian di Jawa Tengah wilayah barat selatan. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih agar RSMS mampu menjadi tempat pelayanan kesehatan yang handal untuk penanganan rujukan ibu melahirkan di wilayah Jawa Tengah Barat Selatan.

Meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat berpengaruh pula terhadap tuntutan pelayanan kesehatan yang prima dan bermutu, biaya bukan satu-satunya pertimbangan pelayanan kesehatan namun yang diutamakan adalah kepuasan atas pelayanan provider dan fasilitas pelayanan yang nyaman dan memadai. Dengan fenomena tersebut maka pengembangan pelayanan kasus PTM dan ibu hamil menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi RSMS.

Asumsi-asumsi lain yang masih perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Pj. Gubernur Jawa Tengah untuk perencanaan tahun 2025 meliputi :
  - a. Penjaminan mutu pendidikan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, kerjasama pendidikan dan penguatan pendidikan karakter.
  - b. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat,
  - c. Penendalian inflasi dan ketahanan pangan;
  - d. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan angka pengangguran dan stunting;
  - e. Penanganan dampak perubahan iklim;
  - f. Peningkatan kualitas sistem pendidikan vokasi;
  - g. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif;

- h. Pengembangan ekonomi sirkuler dan transisi energi;
  - i. Pengembangan layanan publik dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik ( SPBE);
  - j. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Tengah tahun 2025 diukur dengan 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan proyeksi sebagai berikut :
- a) PDRB per kapta sekitar 47,60 juta rupiah;
  - b) Angka kemiskinan sebesar 9,28 – 8,08 persen;
  - c) Rasio gini sebesar 0,362;
  - d) Pertumbuhan ekonomi 4,80 – 5,60 persen;
  - e) Inflasi pada angka  $2,5 \pm 1$  persen;
  - f) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,20 – 4,60 persen;
  - g) Nilai tukar petani sebesar 107,52
  - h) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
  - i) Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 60,24;
  - j) Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
  - k) Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
  - l) Indeks Kualits Lingkungan Hidup sebesar 67,56;
  - m) Indeks Risiko Bencana turun 4,00 persen; dan
  - n) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00
3. Tema RKPD 2025 (RPJMD) Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026 diarahkan kepada **“Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”**, dengan prioritas daerah pada:
- a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saaing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
  - b. Peningkatan kuaalitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata;
  - c. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; dan
  - d. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif.
4. Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2025-2045 dalam upaya melaksanakan 8 Agenda Pembangunan Nasional
5. AHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. AHH naik dari 74,37 pada tahun 2020 menjadi 74,47

pada tahun 2021, artinya secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 75 tahun. Hal ini menunjukkan semakin membaiknya pelayanan kesehatan untuk masyarakat, dan didukung meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan.

Mengacu pada asumsi-asumsi sesuai uraian diatas serta makna isu strategis pengembangan Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang akan diterapkan di RSMS yang tercermin dalam renstra 2024-2026 untuk mengembangkan Pelayanan Unggulan :

- 1) Pelayanan Jantung
- 2) Pelayanan Bedah Otak dan Saraf
- 3) Pelayanan Maternal Perinatal

Pada Tahun 2022 dan 2023 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo juga ditunjuk oleh Kemenkes sebagai Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Jantung, Kanker, Stroke/Neurologi dan Nefro-Urologi.

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi RSUD Prof. Dr. Marggono Soekarjo Purwokerto.
  - a. Kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular di Jawa Tengah.
  - b. Terbatasnya jumlah tenaga medis/paramedis (rasio tidak seimbang)
  - c. Kurangnya komitmen dan loyalitas pegawai terhadap RS.
  - d. Belum optimalnya pemberdayaan struktur dan SDM
  - e. Belum optimalnya kemampuan manajerial para kepala unit fungsional
  - f. Kurang optimalnya utilisasi alat medis & penunjang medis
  - g. Belum konsistennya kepastian waktu pelayanan
  - h. Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medis
  - i. Kurang optimalnya manajemen operasional pelayanan dan pendukung pelayanan
  - j. Kurang optimalnya pelaksanaan SOP
  - k. Adanya Internal Kompetitor
  - l. Masih adanya sikap reaktif yang tidak proporsional
  - m. Tarif belum seluruhnya didasarkan pada perhitungan unit cost.
  - n. RSMS merupakan RS milik Pemprov yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki RS Pemkab
  - o. Adanya pihak ketiga yang mengontrol pelayanan/manajemen kesehatan secara tidak proporsional
  - p. Banyaknya RS swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesifik
  - q. Adanya tuntutan pelayanan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang tidak rasional
  - r. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima
  - s. Tingginya biaya operasional sebagai RS pendidikan
  - t. Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan sosial (PBI dan Non PBI)
  - u. Kurang memadainya tarif asuransi kesehatan sosial

- v. Pengembangan pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dan jejaring pelayanan Kardiovaskuler intervensi dan neuro intervensi (Pelayanan Stroke Intervensi)

3. Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

**Visi** pembangunan Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu “**Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahteraan Lestari**”.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 6 (empat) **Misi** pembangunan daerah, yaitu :

- a. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;
- c. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jejaring;
- d. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan;
- e. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan
- f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai, dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender.

Adapun kinerja Rumah Sakit sesuai dengan misi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah nomor 1 yaitu “**Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya**”.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo.

Disamping permasalahan seperti pada point di atas RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo memiliki peluang besar untuk meningkatkan pelayanan. Adapun tantangan dan peluang yang ada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo adalah sebagai berikut:

a. Tantangan, meliputi:

- 1. RSMS merupakan RS milik Pemprov yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas yang memiliki RS Pemkab
- 2. Adanya pihak ketiga yang mengontrol pelayanan/manajemen kesehatan secara tidak proporsional
- 3. Banyaknya RS swasta yang memiliki keunggulan pelayanan yang spesifik

4. Adanya tuntutan pelayanan konsumen terhadap pelayanan kesehatan yang tidak rasional
5. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Kesehatan yang prima
6. Mahalnya pembiayaan pelayanan di RSMS
7. Tingginya biaya operasional sebagai RS pendidikan
8. Tingginya jumlah pasien dengan jaminan asuransi kesehatan sosial (PBI dan Non PBI)
9. Kurang memadainya tarif asuransi kesehatan sosial
10. Tidak adanya kepastian biaya pelayanan

b. Peluang, meliputi

1. Tingginya dukungan Legislatif terhadap pengembangan pelayanan RS;
2. Adanya dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pengembangan manajemen dan organisasi RS;
3. Lingkungan Geografi & demografi yang strategis;
4. Adanya pengembangan kerjasama di bidang pendidikan dan pelayanan RS;
5. Adanya dukungan berbagai pihak (stake holder) terhadap RS
6. Belum adanya pesaing RS yang setara di Jawa Tengah kawasan Barat-Selatan;
7. Adanya pelayanan unggulan yang tidak dimiliki oleh RS sekitar;
8. Tingginya cakupan dan luasnya jangkauan pelayanan RS;
9. Tersediannya jaminan asuransi bagi masyarakat miskin;
10. RSMS sebagai RS rujukan di kawasan Barat Selatan memiliki Citra Positif;
11. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berbasis teknologi kedokteran;
12. Tingginya minat masyarakat terhadap pelayanan VIP dan VVIP
13. Adanya PERMENDAGRI 79 tahun 2018 tentang pedoman teknis PPK-BLUD;
14. Adanya PERGUB sebagai dasar penetapan PPK-BLUD.
15. Pengembangan pelayanan rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan dan jejaring pelayanan Kardiovaskuler intervensi dan neuro intervensi (Pelayanan Stroke Intervensi)

5. Formulasi Isu-Isu Penting

Sesuai dengan hasil analisis terhadap lingkungan organisasi diatas selanjutnya dapat dirumuskan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dihasilkan melalui analisis strategi sebagai berikut:

a. Strategi S – O (Offensive Strategy)

Strategi S – O adalah strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, adapun strategi-strategi tersebut meliputi:

1. Optimalkan tenaga medis yang handal dan profesional untuk mengembangkan pelayanan-pelayanan unggulan
2. Optimalkan ketersediaan dana APBD maupun APBN dalam pengelolaan pelayanan kesehatan
3. Optimalkan pemanfaatan sarana & prasarana serta lokasi yang strategis sebagai pendukung proses pelayanan

4. Optimalkan alat kedokteran yang canggih sebagai pendukung pelayanan unggulan
  5. Optimalkan dukungan pemerintah provinsi, legislatif dan stake holder dalam rangka PPK-BLUD sesuai PERMENDAGRI 79 tahun 2018
  6. Akulturasi budaya learning organisation untuk memantapkan kepedulian terhadap pelanggan
  7. Optimalkan manajemen jaminan mutu untuk mempertahankan citra positif RS sehingga minat masyarakat terhadap pelayanan RS (paviliun maupun private) semakin meningkat
  8. Optimalkan pelayanan unggulan untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan
- b. Strategi S – T
- Strategi S-T adalah strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :
1. Pertahankan predikat akreditasi untuk menghadapi kontrol pelayanan kesehatan yang tidak proposional dan ancaman tuntutan pelanggan terhadap pelayanan RS serta meningkatkan kepuasan pelanggan
  2. Optimalkan pengembangan program pelayanan unggulan untuk menekan internal maupun eksternal kompetitor di sekitar RSMS
  3. Pertahankan citra RS yang positif dengan pemantapan learning organisation
  4. Optimalkan pelaksanaan SOP untuk kepastian biaya pasien
- c. Strategi W – O (Turn Around Strategy)
- Strategi W – O adalah strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi :
1. Tingkatkan komitmen SDM dengan PPK-BLUD sehingga RS dapat menerapkan sistem pentarifan dan remunerasi yang lebih adil dan proporsional
  2. Dibangunnya sistem remunerasi dengan mengoptimalkan SIMRS untuk menerapkan budaya reward & punishment
  3. Atasi kualitas SDM yang belum memadai dengan diklat atas dukungan dana APBD
  4. Atasi budaya reaktif yang tidak proporsional dan ketidakkonsistenan menjalankan SOP dengan pemantapan budaya learning organisation
  5. Atasi kurang optimalnya manajemen pemeliharaan dan utilisasi alat dengan modal kemauan untuk melakukan perubahan.
- d. Strategi W – T (Defensif Strategy)
- Strategi W – T adalah strategi untuk meminimalkan kelemahan dalam menghadapi ancaman. Adapun strategi-strategi tersebut meliputi:
1. Tingkatkan komitmen & kualitas SDM dengan tingginya ancaman tuntutan pelayanan kesehatan oleh pelanggan
  2. Tingkatkan efisiensi pelayanan untuk pasien dengan jaminan asuransi kesehatan maskin

3. Atasi peraturan yang tidak fleksibel dengan penerapan PPK-BLUD
4. Perbaiki sistem pentarifan untuk pasien miskin

Berdasarkan tabel analisis strategi di atas maka dapat disimpulkan, yang menjadi isu-isu strategis adalah:

1. Pengembangan kualitas & kuantitas SDM untuk meningkatkan kapasitas
2. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran
3. Peningkatan manajemen sarana & prasarana RS
4. Pengembangan manajemen mutu RS
5. Pengembangan promosi & kerjasama dengan pihak ketiga
6. Pengembangan sistem perencanaan anggaran PPK-BLUD
7. Pengembangan budaya organisasi pembelajar

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berikut ini hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.

Mendasarkan RPJPD Tahun 2005 - 2025 dan isu strategis pembangunan, maka pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter, fokus pada :

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata. Adapun reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada matrik berikut :

Tabel 2.4  
Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

| No  | Rancangan Awal RKPD                                              |             |                                                                                     |                |                 | Hasil Analisis Kebutuhan                                         |             |                                                                                     |                |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|     | Program/Kegiatan                                                 | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif  | Program/Kegiatan                                                 | Lokasi      | Indikator Kinerja                                                                   | Target Capaian | Pagu Indikatif  |
| (1) | (2)                                                              | (3)         | (4)                                                                                 | (5)            | (6)             | (7)                                                              | (8)         | (9)                                                                                 | (10)           | (11)            |
|     | <b>URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH</b>                        |             |                                                                                     |                |                 |                                                                  |             |                                                                                     |                |                 |
| 1   | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi</b>       | <b>RSMS</b> | <b>Prosentase capaian CRR Total</b>                                                 | <b>83%</b>     | 636.800.000.000 | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Provinsi</b>       | <b>RSMS</b> | <b>Prosentase capaian CRR Total</b>                                                 | <b>83%</b>     | 496.800.000.000 |
|     | Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | RSMS        | Persentase CRR Parsial                                                              | 95             | 636.800.000.000 | Keg. Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | RSMS        | Persentase CRR Parsial                                                              | 95             | 496.800.000.000 |
|     | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>       | <b>RSMS</b> | <b>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD</b>          | <b>100%</b>    | 80.504.886.000  | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>       | <b>RSMS</b> | <b>Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan PD</b>          | <b>100%</b>    | 129.786.997.000 |
|     | Kegiatan Admistrasi Keuangan PD                                  | RSMS        | Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan PD                                 | 12 Lap         | 80.504.886.000  | Kegiatan Admistrasi Keuangan PD                                  | RSMS        | Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan PD                                 | 12 Lap         | 129.186.939.000 |
|     | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | RSMS        |                                                                                     |                |                 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | RSMS        |                                                                                     |                | 5.000.000       |
|     | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSMS        | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | 1 Unit         |                 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | RSMS        | Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *** | 1 Unit         | 25.000.000      |
|     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |             |                                                                                     |                |                 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |             |                                                                                     |                | 10.000.000      |
|     | <b>URUSAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN</b>                          |             |                                                                                     |                |                 | <b>URUSAN PELAYANAN DASAR KESEHATAN</b>                          |             |                                                                                     |                |                 |



|   |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                |       |                 |                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                |       |                 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 1 | <b>Program Pemenuhan UKP dan UKM</b>                                                                                                         | RSMS | <b>Persentase Pemenuhan UKP dan UKM</b>                                                                                                        | 100%  | -               | <b>Program Pemenuhan UKP dan UKM</b>                                                                                                         | RSMS | <b>Persentase Pemenuhan UKP dan UKM</b>                                                                                                        | 100%  | 80.000.000      |
|   | Kegiatan Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | RSMS | Persentase Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | 100%  |                 | Kegiatan Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | RSMS | Persentase Penyediaan Fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi | 100%  | 60.000.000      |
|   | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                | RSMS | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit ***                                     | 100%  |                 | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                                | RSMS | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit ***                                     | 100%  | 20.000.000      |
| 2 | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>                                                                           | RSMS | <b>Prosentase SDM Kesehatan yang terlatih</b>                                                                                                  | 100%  | -               | <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>                                                                           | RSMS | <b>Prosentase SDM Kesehatan yang terlatih</b>                                                                                                  | 100%  | 40.000.000      |
|   | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                           | RSMS | Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan                                                              | 5 Keg |                 | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                                           | RSMS | Jumlah kegiatan pengembangan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang diselenggarakan                                                              | 5 Keg | 40.000.000      |
| 3 | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>                                                                                      | RSMS | <b>Capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat propinsi</b>                                                           | 100%  |                 | <b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>                                                                                      | RSMS | <b>Capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat propinsi</b>                                                           | 100%  | 40.000.000      |
|   | Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi                      | RSMS | Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan                                                                          | 3 Keg |                 | Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi                      | RSMS | Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan                                                                          | 3 Keg | 40.000.000      |
|   | <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |       | 717.304.886.000 | <b>JUMLAH</b>                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                |       | 626.186.939.000 |

**2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Untuk tahun 2025 RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto mendapatkan usulan sektoral terkait melalui kegiatan Forum OPD yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, LSM, assosiasi, perguruan tinggi maupun perangkat daerah kabupaten/kota yang ditujukan secara langsung.

Tabel 2.5  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|-----------------|---------|
|    |                  |        |                   |                 |         |
|    |                  |        |                   |                 |         |
|    |                  |        |                   |                 |         |
|    |                  |        |                   |                 |         |
|    |                  |        |                   |                 |         |
|    |                  |        |                   |                 |         |

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan Tupoksi; Tujuan dan sasaran Renja

**3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

| No | Kebijakan                                                                         |                                                                                                  |                                                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|    | RSUD Prof. Dr.Margono Soekarjo                                                    | Provinsi Jawa Tengah                                                                             | Nasional                                           |
| 1  | 2                                                                                 | 3                                                                                                | 4                                                  |
| 1. | Pemanfaatan media dan institusi sebagai sarana promosi.                           | Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing . | 1. SDM berkualitas dan berdaya saing.              |
| 2  | Penerapan Sistem Informasi Manajemen terintegrasi secara total menuju paperless   |                                                                                                  | 2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan      |
| 3  | Pemanfaatan teknologi kedokteran canggih untuk ketepatan diagnosa dan terapi      |                                                                                                  | 3. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar |
| 4  | Penyediaan Sarpras RS yang unggul, aman dan Efisien                               |                                                                                                  |                                                    |
| 5  | Pengikatan kerjasama dengan institusi pendidikan yang menjamin mutu RS Pendidikan |                                                                                                  |                                                    |

Mengacu RPJMN I 2025-2029 merupakan merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045. “RPJMN ini merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan delapan agenda prioritas pembangunan RPJPN 2025-2045, yaitu:

1. Mewujudkan transformasi sosial;
2. Mewujudkan transpormasi ekonomi;
3. Mewujudkan transformasi tata kelola;
4. Memantapkan supremasi hukum, stabibilitas dan kepemimpinan Indonesia;

5. Menetapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi;
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7. Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8. Mewujudkan keseimbangan pembangunan;

Pembangunan nasional jangka menengah dilaksanakan untuk mencapai sasaran utama pembangunan nasional di tahun 2025, antara lain meliputi:

- a. Pendapatan perkapita setara dengan negara maju
- b. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang
- c. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
- d. Daya saing SDM meningkat
- e. Intensitas emisi GRF menurun menuju net zero emission

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama pembangunan nasional tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Arah pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025 yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing Jawa Tengah”**, diantaranya dengan :

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas dengan melihat dampak lingkungan;
- b. Mendorong penguatan struktur ekonomi yang dominan dengan penguatan produk unggulan daerah;
- c. Pembangunan infra struktur diprioritaskan pengembangan berbasis daerah, agar dapat menunjang jenis usaha unggulan daerah;
- d. Perlunya menjaga ekosistem lingkungan, dengan menyatukan visi dan misi menjaga lingkungan oleh semua kepala daerah di Provinsi Jawa tengah, baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat desa;
- e. Meningkatkan kualitas pendidikan dengan penguatan sistem pendidikan dan penguatan infrastruktur dan kesejahteraan guru dan kurikulum berbasis lokal;
- f. Peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang harus menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Dalam penanggulangan kemiskinan, stunting, pengangguran, serta kematian ibu melahirkan dan kematian bayi, maka perlu strategi :
  1. Penanganan dilakukan secara sinergi dan terintegrasi serta berkesinambungan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, swasta dan masyarakat;
  2. Seluruh permasalahan diselesaikan lebih focus pada akar permasalahan utamanya terkait ekonomi keluarga, pendidikan dan budaya masyarakat;
  3. Membedah otonomi setiap permasalahan dan menyepakati solusinya.

Adapun kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto disinkronkan dengan kebijakan daerah dan urusan yang menjadi kewenangan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto yaitu:

1. Kualitas hidup dan Daya Saing SDM yaitu Peningkatan upaya promotif dan preventif dengan tetap memperbaiki upaya kuratif dan rehabilitatif melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Peningkatan promosi kesehatan yang efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan melalui penguatan kelembagaan dan jejaring promosi misalnya Tim Ponek, Poned dan Tim Promosi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Dinas terkait lainnya, informasi-informasi pengembangan pelayanan dan kegiatan pelayanan secara massif melalui media social dan elektronik RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
2. Peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (alat kesehatan dan penunjang) sesuai standar RS Kelas A
3. Pengembangan SIM RS Rujukan *Online*; peningkatan kualitas dan pemerataan cakupan tenaga kesehatan. Kebijakan ini diwujudkan melalui penyusunan sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi menuju paperless.
4. Peningkatan capaian wilayah *melalui kegiatan pengembangan informasi pelayanan publik berbasis IT*.
5. Penetapan Indikator Kinerja dengan Penurunan angka kesakitan dan kematian melalui Standar Pelayanan Minimum (SPM), Peningkatan kualitas pelayanan melalui Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.**

Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja **RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto** berdasarkan rancangan awal Renstra **RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto** tahun 2024 - 2026 adalah :

1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator AHH (Umur Harapan Hidup) yaitu rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu, dengan sasaran yang akan diwujudkan adalah:  
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, dengan indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.
2. Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi PD dengan sasaran yang akan diwujudkan :
  - a. Meningkatnya kualitas pelayanan PD dengan indikator sasaran yang akan dicapai Indeks Kepuasan Masyarakat.
  - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko PD dengan indikator sasaran yang akan dicapai Indeks Manajemen Risiko.

Perumusan tujuan dan sasaran Renja PD sesuai dengan tupoksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD, dituangkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.1**

**Tujuan dan Sasaran RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun 2025**

| No | Tujuan                                                                    | Saran                                                       | Indikator Tujuan dan Sasaran                       | Satuan | Target |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                                 |                                                             | Umur Harapan Hidup (UHH)                           | Tahun  | 74.65  |
|    |                                                                           | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan prima dan rujukan | Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) | %      | 90,05  |
| 2. | Meningkatkan Kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah |                                                             | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah        | Angka  | 90     |
|    |                                                                           | Meningkatnya kualits pelayanan PD                           | Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM)                    | Angka  | 91     |
|    |                                                                           | Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko PD                 | Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah           | Angka  | 3      |

**3.3 Manajemen Risiko Strategi Perangkat Daerah**

Manajen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renja PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagai berikut :

**Tabel 3.2**

**Rencana Tindak Penendalian Terhadap Risiko Strategis Perangkat Daerah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.**

| Tujuan/Sarasan Strategis PD                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD          | Pernyataan Risiko                                              | Skala Risiko | Sebab                                                                                    | Dampak                                         | Rencana Tindak Pengendalian                                                              | Penanggung jawab | Target Waktu Penyelesaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                        | 2                                            | 3                                                              | 4            | 5                                                                                        | 6                                              | 7                                                                                        | 8                | 9                         |
| Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                                                     |                                              |                                                                |              |                                                                                          |                                                |                                                                                          |                  |                           |
| Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan Primer dan Rujukan di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo | Presentase capaian Standar Pelayanan Minimal | Pelayanan Kesehatan tidak sesuai Standar yang sudah ditetapkan | UC           | Sarana dan prasarana belum memadai. Jumlah SDM Kesehatan belum terpenuhi sesuai standar. | Mutu pelayanan tidak sesuai standar            | Pemenuhan Sarana dan Prasarana pelayanan. Pengembangan dan peningkatan Kompetensi SDM.   | Direktur         | Semester 2                |
| Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah                     |                                              |                                                                |              |                                                                                          |                                                |                                                                                          |                  |                           |
| Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                   | Mutu Pelayanan kurang optimal                                  | UC           | Kompetensi SDM rendah dan pelayanan tidak profesional/tidak sesuai harapan pelanggan     | Citra rumah sakit Buruk                        | Monitoring dan evaluasi kepatuhan Standar Layanan                                        | Direktur         | Semester 2                |
| Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah                                     | Indeks Manajemen Risiko                      | Penyusunan register risiko RS kurang tepat                     | UC           | Penyusunan Register risiko tidak melibatkan semua unsur di dalam rumah sakit             | Tindak pengendalian Risiko tidak tepat sasaran | Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Rencana tindak Pengendalian yang sudah ada | Direktur         | Semester 2                |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025**

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 4 (empat) Program dengan 9 (sembilan) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan sebagai berikut:

**1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi;
  - Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
  - Sub Kegiatan Pengembangan Rumah Sakit;
  - Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
  - Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola RS

**2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan** yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi.
  - Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

**3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan** yang terdiri dari 1 kegiatan yaitu

- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.
  - Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi

**4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** yang terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



- Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
    - Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
- Kebutuhan dana/pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program adalah Rp 717.304.886.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah.

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Program dan Kegiatan RSUD Prof Dr Margono Tahun 2025**

| Tujuan                                                                    | Indikator Tujuan                              | Sasaran                                          | Indikator Sasaran          | Kode    | Program                                               | Indikator Program | Kegiatan | Indikator Kegiatan | Sub Kegiatan | Indikator Sub Kegiatan | Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                 | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------|------------------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------|
|                                                                           |                                               |                                                  |                            |         |                                                       |                   |          |                    |              |                        |        | 2025                                           |                 |                             |        |
|                                                                           |                                               |                                                  |                            |         |                                                       |                   |          |                    |              |                        |        | Target                                         | Rp              |                             |        |
| (1)                                                                       | (2)                                           | (3)                                              | (4)                        | (5)     | (6)                                                   | (7)               | (8)      | (9)                | (10)         | (11)                   | (12)   | (13)                                           | (14)            | (15)                        | (16)   |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah |                                               |                                                  |                            |         |                                                       |                   |          |                    |              |                        |        |                                                | 717.304.886.000 |                             |        |
|                                                                           | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) |                                                  |                            |         |                                                       |                   |          |                    |              |                        | Angka  | 90                                             |                 |                             |        |
|                                                                           |                                               | Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah |                            |         |                                                       |                   |          |                    |              |                        |        |                                                | 717.304.886.000 |                             |        |
|                                                                           |                                               |                                                  | Indeks Kepuasan Masyarakat |         |                                                       |                   |          |                    |              |                        | Angka  | 91                                             | 717.304.886.000 |                             |        |
|                                                                           |                                               |                                                  |                            | X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                   |          |                    |              |                        |        |                                                | 717.304.886.000 |                             |        |

|  |  |  |  |                  |  |                                                                                    |                            |                                  |                                        |                                                                |      |     |                 |                     |              |
|--|--|--|--|------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------|---------------------|--------------|
|  |  |  |  |                  |  | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                           |                            |                                  |                                        |                                                                | %    | 83  | 636.800.000.000 |                     |              |
|  |  |  |  | X.XX.01.1.10     |  |                                                                                    | Peningkatan Pelayanan BLUD |                                  |                                        |                                                                |      |     | 636.800.000.000 |                     |              |
|  |  |  |  |                  |  |                                                                                    |                            | Cost Recovery Rate (CRR) Parsial |                                        |                                                                | %    | 97  | 636.800.000.000 |                     |              |
|  |  |  |  | X.XX.01.1.10.001 |  |                                                                                    |                            |                                  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |                                                                |      |     | 636.800.000.000 |                     |              |
|  |  |  |  |                  |  |                                                                                    |                            |                                  |                                        | Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan | Unit | 1   | 636.800.000.000 | SUBBAGIAN AKUNTANSI | OPD Provinsi |
|  |  |  |  |                  |  | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah |                            |                                  |                                        |                                                                | %    | 100 | 80.504.886.000  |                     |              |

|        |  |  |  |                  |  |  |                                        |                                                                          |                                   |                                                   |         |     |                 |                                         |              |
|--------|--|--|--|------------------|--|--|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------|-----|-----------------|-----------------------------------------|--------------|
|        |  |  |  | X.XX.01.1.02     |  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |                                                                          |                                   |                                                   |         |     | 80.504.886.000  |                                         |              |
|        |  |  |  |                  |  |  |                                        | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun |                                   |                                                   | Dokumen | 12  | 80.504.886.000  |                                         |              |
|        |  |  |  | X.XX.01.1.02.001 |  |  |                                        |                                                                          | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |                                                   |         |     | 80.504.886.000  |                                         |              |
|        |  |  |  |                  |  |  |                                        |                                                                          |                                   | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | Orang   | 823 | 80.504.886.000  | SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN DAN VERIFIKASI | OPD Provinsi |
| JUMLAH |  |  |  |                  |  |  |                                        |                                                                          |                                   |                                                   |         |     | 717.304.886.000 |                                         |              |

#### 4.2. Manajemen Risiko Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

Adapun Program /Kegiatan yang dilakukan proses manajemen risiko merupakan program/kegiatan yang dinilai menjadi program/kegiatan yang memberikan kontribusi cukup besar pada pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah maupun pembangunan daerah, yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.2**

**Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Program/Kegiatan Perangkat Daerah RSUD Prof Dr Margono Soekarjo  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.**

| Program/Kegiatan PD                                                                                                                          | Indikator Kinerja Program/Kegiatan PD                                                                                                     | Pernyataan Risiko                                                             | Skala Risiko | Sebab                                                                                   | Dampak                                                                               | Rencana Tindak Pengendalian                                                                                                                | Penanggung jawab              | Target Waktu Penyelesaian |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                         | 3                                                                             | 4            | 5                                                                                       | 6                                                                                    | 7                                                                                                                                          | 8                             | 9                         |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan & Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat                                                                  | Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                  | Penyusunan prioritas kebutuhan Sarpras dan Pemenuhan Nilai TKDN belum optimal | UC           | Gagal melakukan pentapisan dan Pengkajian Usulan Sarpras Pelayanan/ Penunjang Pelayanan | Pemenuhan Sarpras tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan                   | Ketepatan kajian Perencanaan Sarpras & Aldok E Catalog                                                                                     | Wadir Pelayanan dan Kerjasama | Semester 2                |
| Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, sarana, prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi daerah | Peluang KKN dalam proses pengadaan barangjasa                                 | C            | Pengadaan barang/jasa berdasarkan komisi yang diberikan kepada pejabat pengadaan/user   | Resiko pemilihan barang tidak sesuai dengan spesifikasi standar alat yang ditentukan | Optimalkan Komunikasi Efektif dan Pemanfaatan Sistem IT justifikasi pemilhat alkes dan kebutuhan lain dilakukan melalui tim pemilihan yang | Kepala Bidang Pelayanan       | Semester 2                |

|                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |    |                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| (DBHCHT dan DAK)                                                                                       |                                                                                                        |                                                                                     |    |                                                                                                |                                                                         | melibatkan semua unsur terkait                                                                                                                                                                                                  |                                  |            |
| Kegiatan Penerbitan ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit | Gagal dalam proses mempertahankan status paripurna akreditasi standar kemenkes      | C  | Komitmen dan kepatuhan SDM rumah sakit rendah                                                  | Mutu pelayanan rumah sakit rendah citra rumah sakit buruk               | Monitoring dan evaluasi hasil penilaian akreditasi secara berkala dengan menghadirkan pihak terkait                                                                                                                             | Kepala Bidang Mutu dan Kerjasama | Semester 2 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan                                                    | Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                         | Perencanaan jumlah SDM yang akan dilatih tidak berdasarkan analisis gap kompetensi  | C  | Analisis Gap kompetensi tidak dilakukan dengan tepat                                           | Capaian SDM terlatih tidak mencapai target                              | Koordinasi dan kerjasama dengan Penyelenggaraan Pelatihan dan pendidikan                                                                                                                                                        | Wadir Penunjang dan Pendidikan   | Semester 2 |
| Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi     | Jumlah diklat yang dilaksanakan                                                                        | Penyelenggaraan Pelatihan/Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM | UC | Terbatasnya penyelenggara pelatihan/pendidikan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang dibutuhkan | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak tercapai | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelatih dan Narasumber di Rumah sakit<br>2. Digitalisasi dalam Sistem Pembelajaran rumah sakit<br>3. Peningkatan Sarana prasarana pembelajaran baik teori maupun praktek<br>4. Pembukaan Pelatihan | Kepala Bidang Diklat             | Semester 2 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                          |           |                                                                                                                       |                                                                                                                              |                                                                                          |                           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                          |           |                                                                                                                       |                                                                                                                              | untuk eksternal                                                                          |                           |            |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                         | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | Pemenuhan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat belum efektif                                     | C         | Kelemahan menetapkan jenis media dan sasaran yang ditetapkan                                                          | Target sasaran promosi kesehatan tidak sesuai                                                                                | Melibatkan semua stake holder dan masyarakat dalam menentukan kebutuhan kegiatan promosi | Wadir Umum dan Keuangan   | Semester 2 |
| Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan                                                    | Gagal menyediakan media promosi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat                          | C         | Media elektronik tidak bekerja secara sempurna dan kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak operasional                | Promosi melalui media elektronik tidak optimal mencapai target sasaran. Kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak terlaksana . | Ketepatan Kajian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat desa dampingan             | Kepala Bagian Umum        | Semester 2 |
| Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi                                                                      | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                 | Pendapatan RS belum mampu membiayai seluruh biaya operasional rumah sakit baik Anggaran BLUD maupun APBD | <u>UC</u> | Tingginya biaya operasional rumah sakit karena perubahan kebijakan dan perubahan harga/pembiayaan dan lambatnya klaim | Target Pendapatan Rumah sakit Tidak terpenuhi                                                                                | Manfaatkan TI untuk mengontrol Belanja dan pendapatan                                    | Wadir Umum dan Keuangan   | Semester 2 |
| Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD                                                                                      | Cost Recovery Rate (CRR) Parsial                                                                                         | Risiko terjadinya Fraud pada Proses pelayanan dan Klaim BPJS/Asuransi lain                               | <u>C</u>  | Ketidaktepatan dalam melakukan proses Verifikasi dokumen dan koding klaim                                             | Klaim tidak sesuai dengan standar, Citra rumah sakit                                                                         | Peningkatan kepatuhan dalam kelengkapan data dan proses                                  | Kepala Bagian Perencanaan | Semester 2 |

|                                                 |                                                                          |                                                      |           |                                                            |                                            |                                                                                                            |                        |            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|                                                 |                                                                          |                                                      |           |                                                            | jelek, Gugatan hukum                       | verifikasi yang tepat                                                                                      |                        |            |
| Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK terhambat | <u>UC</u> | Adanya perubahan regulasi pemberian gaji dan tunjangan ASN | Pemberian gaji dan tunjangan ASN terlambat | Peningkatan kerjasama dengan Bank Jateng untuk pembayaran gaji dan tunjangan sesuai waktu yang ditetapkan. | Kepala Bagian Keuangan | Semester 2 |



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun 2025 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo “Prima Dalam Pelayanan Sub Spesialistik dan Pendidikan Profesi”.

Rencana Kerja Tahun 2025 ini mengacu pada dokumen Rencana Strategik (Renstra) RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Tahun 2024 - 2026 sesuai Permendagri 90/2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Kemendagri No. 050.3708/2020 tentang Penyesuaian Nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub sub kegiatan.

Mengacu pada Renstra 2024-2026 pada tahun 2025 ini RSUD Prof Dr Margono Sorkarjo masih banyak Kegiatan yang belum mendapatkan support anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga harus dibiayai dari anggaran BLUD. Terkait dengan program pengampunan KJSU masih banyak membutuhkan pendanaan baik dari sumber APBD, DAK maupun DBHCHT agar tujuan dari pengampunan dapat tercapai.

Akhirnya, dengan telah disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat dijadikan acuan kerja khususnya bagi seluruh aparat RSUD Prof Dr Margono Soekarjo dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait, sehingga dapat mendukung Visi Jawa Tengah yaitu “ Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari”.

## **LAMPIRAN**

### **MANAJEMEN RISIKO PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan yang berbasis risiko menjadi hal penting agar sejak awal perencanaan, perangkat daerah sudah dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan muncul dimasa yang akan datang, dan sudah dilakukan upaya mitigasi sejak awal. Oleh karena itu dalam menyusun Renja PD, manajemen risiko menjadi proses yang terintegrasi dan dilakukan secara simultan dengan proses penyusunan Renja PD. Proses manajemen risiko berdasarkan pada Pergub Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkunga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tahapan manajemen risiko dilakukan secara terpisah antara risiko tujuan/sasaran perangkat daerah, program dan kegiatan.

- a. Identifikasi Risiko
- b. Analisis Risiko
- c. Penetapan Risiko Prioritas
- d. Rencana Tindak Pengendalian

Yang dijabarkan dalam tabel-tabel sebagai berikut :

Tabel 1  
Identifikasi Risiko

| No | Jenis Konteks Risiko | Tujuan/Sasaran Strategis/Program /Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja                                                                                                        | Risiko                                                                        | Kategori Risiko    | Sebab                                                                                    | Dampak                                                             |                  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
|    |                      |                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                               |                    |                                                                                          | Uraian                                                             | Pihak Yg Terkena |
| 1  | 2                    | 3                                                                                                        | 4                                                                                                                        | 5                                                                             | 6                  | 7                                                                                        | 8                                                                  | 9                |
|    |                      | Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                                                     |                                                                                                                          |                                                                               |                    |                                                                                          |                                                                    |                  |
|    | Sasaran Strategis    | Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan kesehatan Primer dan Rujukan di RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo | Presentase capaian Standar Pelayanan Minimal                                                                             | Pelayanan Kesehatan tidak sesuai Standar yang sudah ditetapkan                | Resiko Strategis   | Sarana dan prasarana belum memadai. Jumlah SDM Kesehatan belum terpenuhi sesuai standar. | Mutu pelayanan tidak sesuai standar                                | Masyarakat       |
|    |                      | Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah                     |                                                                                                                          |                                                                               |                    |                                                                                          |                                                                    |                  |
|    | Sasaran Strategis    | Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                               | Mutu Pelayanan kurang optimal                                                 | Resiko Strategis   | Kompetensi SDM rendah dan pelayanan tidak profesional/tidak sesuai harapan pelanggan     | Citra rumah sakit Buruk                                            | RS               |
|    | Sasaran Strategis    | Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah                                     | Indeks Manajemen Risiko                                                                                                  | Penyusunan register risiko RS kurang tepat                                    | Resiko Strategis   | Penyusunan Register risiko tidak melibatkan semua unsur di dalam rumah sakit             | Tindak pengendalian Risiko tidak tepat sasaran                     | RS               |
|    | Sasaran Operasional  | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan & Upaya Kesehatan Masyarakat                                | Persentase pemenuhan fasilitas upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | Penyusunan prioritas kebutuhan Sarpras dan Pemenuhan Nilai TKDN belum optimal | Resiko Operasional | Gagal melakukan pentapisan dan Pengkajian Usulan Sarpras Pelayanan/ Penunjang Pelayanan  | Pemenuhan Sarpras tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan | RS               |
|    | Sasaran Operasional  | Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan,                                                                 | Persentase Penyediaan fasilitas                                                                                          | Peluang KKN dalam proses                                                      | Resiko Operasional | Pengadaan barang/jasa                                                                    | Resiko pemilihan barang tidak sesuai                               | RS               |

|  |                     |                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                     |                    |                                                                                                        |                                                                         |            |
|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |                     | Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (DBHCHT dan DAK)     | Pelayanan, sarana, prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP rujukan dan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi daerah        | pengadaan barangjasa                                                                |                    | berdasarkan komisi yang diberikan kepada pejabat pengadaan/user                                        | dengan spesifikasi standar alat yang ditentukan                         |            |
|  | Sasaran Operasional | Kegiatan Penerbitan ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi                   | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit                   | Gagal dalam proses mempertahankan status paripurna akreditasi standar kemenkes      | Resiko Operasional | Komitmen dan kepatuhan SDM rumah sakit rendah                                                          | Mutu pelayanan rumah sakit rendah citra rumah sakit buruk               | RS         |
|  | Sasaran Operasional | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan                                                                      | Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                           | Perencanaan jumlah SDM yang akan dilatih tidak berdasarkan analisis gap kompetensi  | Resiko Operasional | Analisis Gap kompetensi tidak dilakukan dengan tepat                                                   | Capaian SDM terlatih tidak mencapai target                              | RS         |
|  | Sasaran Operasional | Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi                       | Jumlah diklat yang dilaksanakan                                                                                          | Penyelenggaraan Pelatihan/Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM | Resiko Operasional | Terbatasnya penyelenggara pelatihan/pendidikan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang dibutuhkan         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak tercapai | RS         |
|  | Sasaran Operasional | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                         | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | Pemenuhan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat belum efektif                | Resiko Operasional | Terbatasnya penyelenggara pelatihan/pendidikan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang dibutuhkan         | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak tercapai | Pegawai RS |
|  | Sasaran Operasional | Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan                                                    | Gagal menyediakan media promosi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat     | Resiko Operasional | Media elektronik tidak bekerja secara sempurna dan kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak operasional | Promosi melalui media elektronik tidak optimal mencapai target sasaran. | RS         |

|  |                     |                                                     |                                                                          |                                                                                                          |                    |                                                                                                                       |                                                                           |           |
|--|---------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  |                     |                                                     |                                                                          |                                                                                                          |                    |                                                                                                                       | Kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak terlaksana .                      |           |
|  | Sasaran Operasional | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                 | Pendapatan RS belum mampu membiayai seluruh biaya operasional rumah sakit baik Anggaran BLUD maupun APBD | Resiko Operasional | Tingginya biaya operasional rumah sakit karena perubahan kebijakan dan perubahan harga/pembiayaan dan lambatnya klaim | Target Pendapatan Rumah sakit Tidak terpenuhi                             | RS        |
|  | Sasaran Operasional | Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD                 | Cost Recovery Rate (CRR) Parsial                                         | Risiko terjadinya Fraud pada Proses pelayanan dan Klaim BPJS/Asuransi lain                               | Resiko Operasional | Ketidaktepatan dalam melakukan proses Verifikasi dokumen dan koding klaim                                             | Klaim tidak sesuai dengan standar, Citra rumah sakit jelek, Gugatan hukum | RS        |
|  | Sasaran Operasional | Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah     | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK terhambat                                                     | Resiko Operasional | Adanya perubahan regulasi pemberian gaji dan tunjangan ASN                                                            | Pemberian gaji dan tunjangan ASN terlambat                                | Pegwai RS |

**Tabel 2**  
**Analisis Risiko**

| Pernyataan Risiko                                                             | Skala/Nilai Risiko Yang Melekat |              |              | Pengendalian Yang Ada |                                                                                                                                             |                          | Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                               | Skala Probabilitas              | Skala Dampak | Level Risiko | Ada/ Belum Ada        | Uraian                                                                                                                                      | Memadahi/ Belum Memadahi | Skala Probabilitas                                    | Skala Dampak | Level Risiko |
| 1                                                                             | 2                               | 3            | 4            | 5                     | 6                                                                                                                                           | 7                        | 8                                                     | 9            | 10           |
| Pelayanan Kesehatan tidak sesuai Standar yang sudah ditetapkan                | 4                               | 4            | 16           | Ada                   | Pemenuhan Sarana dan Prasarana pelayanan. Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM.                                                      | Memadai                  | 3                                                     | 4            | 12           |
| Mutu Pelayanan kurang optimal                                                 | 4                               | 4            | 16           | Ada                   | Monitoring dan evaluasi kepatuhan Standar Layanan                                                                                           | Memadai                  | 3                                                     | 4            | 12           |
| Penyusunan register RS kurang tepat                                           | 4                               | 4            | 16           | Ada                   | Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Rencana tindak Pengendalian yang sudah ada                                                    | Memadai                  | 3                                                     | 4            | 12           |
| Penyusunan prioritas kebutuhan Sarpras dan Pemenuhan Nilai TKDN belum optimal | 4                               | 4            | 16           | Ada                   | Ketepatan kajian Perencanaan Sarpras & Aldok E Catalog                                                                                      | Memadai                  | 3                                                     | 4            | 12           |
| Peluang KKN dalam proses pengadaan barangjasa                                 | 3                               | 4            | 12           | Ada                   | Optimalkan Komunikasi Efektif dan Pemanfaatan Sistem IT justifikasi pemilihat alkes dan kebutuhan lain dilakukan melalui tim pemilihan yang | Memadahi                 | 3                                                     | 3            | 9            |

|                                                                                     |   |   |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                 |          |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|
|                                                                                     |   |   |    |     | melibatkan semua unsur terkait                                                                                                                                                                                                                  |          |   |   |   |
| Gagal dalam proses mempertahankan status paripurna akreditasi standar kemenkes      | 3 | 4 | 12 | Ada | Monitoring dan evaluasi hasil penilaian akreditasi secara berkala dengan menghadirkan pihak terkait                                                                                                                                             | Memadahi | 3 | 3 | 9 |
| Perencanaan jumlah SDM yang akan dilatih tidak berdasarkan analisis gap kompetensi  | 2 | 5 | 10 | Ada | Koordinasi dan kerjasama dengan Penyelenggaraan Pelatihan dan pendidikan                                                                                                                                                                        | Memadahi | 2 | 4 | 8 |
| Penyelenggaraan Pelatihan/Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM | 3 | 4 | 12 | Ada | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelatih dan Narasumber di Rumah sakit<br>2. Digitalisasi dalam Sistem Pembelajaran rumah sakit<br>3. Peningkatan Sarana prasarana pembelajaran baik teori maupun praktek<br>4. Pembukaan Pelatihan untuk eksternal | Memadahi | 3 | 3 | 9 |
| Pemenuhan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat belum efektif                | 3 | 4 | 12 | Ada | Melibatkan semua stake holder dan masyarakat dalam menentukan kebutuhan kegiatan promosi                                                                                                                                                        | Memadahi | 3 | 3 | 9 |
| Gagal menyediakan media promosi dan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat      | 3 | 4 | 12 | Ada | Ketepatan Kajian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat desa dampingan                                                                                                                                                                    | Memadahi | 3 | 3 | 9 |

|                                                                                                          |   |   |    |     |                                                                                                            |          |   |   |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|
| Pendapatan RS belum mampu membiayai seluruh biaya operasional rumah sakit baik Anggaran BLUD maupun APBD | 3 | 4 | 12 | Ada | Manfaatkan TI untuk mengontrol Belanja dan pendapatan                                                      | Memadahi | 3 | 3 | 9 |
| Risiko terjadinya Fraud pada Proses pelayanan dan Klaim BPJS/Asuransi lain                               | 3 | 4 | 12 | Ada | Peningkatan kepatuhan dalam kelengkapan data dan proses verifikasi yang tepat                              | Memadahi | 3 | 3 | 9 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK terhambat                                                     | 3 | 3 | 9  | Ada | Peningkatan kerjasama dengan Bank Jateng untuk pembayaran gaji dan tunjangan sesuai waktu yang ditetapkan. | Memadai  | 2 | 3 | 6 |



TABEL 3  
RISIKO PRIORITAS

| Resiko Prioritas                                                                    | Skala Risiko | Pemilik Risiko                   | Sebab                                                                                          | Dampak                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelayanan Kesehatan tidak sesuai Standar yang sudah ditetapkan                      | 16           | Direktur                         | Sarana dan prasarana belum memadai. Jumlah SDM Kesehatan belum terpenuhi sesuai standar.       | Mutu pelayanan tidak sesuai standar                                                  |
| Mutu Pelayanan kurang optimal                                                       | 16           | Direktur                         | Kompetensi SDM rendah dan pelayanan tidak profesional/tidak sesuai harapan pelanggan           | Citra rumah sakit Buruk                                                              |
| Penyusunan register RS kurang tepat                                                 | 16           | Direktur                         | Penyusunan Register risiko tidak melibatkan semua unsur di dalam rumah sakit                   | Tindak pengendalian Risiko tidak tepat sasaran                                       |
| Penyusunan prioritas kebutuhan Sarpras dan Pemenuhan Nilai TKDN belum optimal       | 16           | Wadir Pelayanan dan Kerjasama    | Gagal melakukan pentapisan dan Pengkajian Usulan Sarpras Pelayanan/ Penunjang Pelayanan        | Pemenuhan Sarpras tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan                   |
| Peluang KKN dalam proses pengadaan barangjasa                                       | 12           | Kepala Bidang Pelayanan          | Pengadaan barang/jasa berdasarkan komisi yang diberikan kepada pejabat pengadaan/user          | Resiko pemilihan barang tidak sesuai dengan spesifikasi standar alat yang ditentukan |
| Gagal dalam proses mempertahankan status paripurna akreditasi standar kemenkes      | 12           | Kepala Bidang Mutu dan Kerjasama | Komitmen dan kepatuhan SDM rumah sakit rendah                                                  | Mutu pelayanan rumah sakit rendah<br>citra rumah sakit buruk                         |
| Perencanaan jumlah SDM yang akan dilatih tidak berdasarkan analisis gap kompetensi  | 10           | Wadir Penunjang dan Pendidikan   | Analisis Gap kompetensi tidak dilakukan dengan tepat                                           | Capaian SDM terlatih tidak mencapai target                                           |
| Penyelenggaraan Pelatihan/Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM | 12           | Kepala Bidang Diklat             | Terbatasnya penyelenggara pelatihan/pendidikan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang dibutuhkan | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak tercapai              |
| Pemenuhan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat belum efektif                | 12           | Wadir Umum dan Keuangan          | Terbatasnya penyelenggara pelatihan/pendidikan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang dibutuhkan | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak tercapai              |

|                                                                                                          |    |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gagal menyediakan media promosi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat                          | 12 | Kepala Bagian Umum        | Media elektronik tidak bekerja secara sempurna dan kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak operasional                | Promosi melalui media elektronik tidak optimal mencapai target sasaran. Kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak terlaksana . |
| Pendapatan RS belum mampu membiayai seluruh biaya operasional rumah sakit baik Anggaran BLUD maupun APBD | 12 | Wadir Umum dan Keuangan   | Tingginya biaya operasional rumah sakit karena perubahan kebijakan dan perubahan harga/pembiayaan dan lambatnya klaim | Target Pendapatan Rumah sakit Tidak terpenuhi                                                                                |
| Risiko terjadinya Fraud pada Proses pelayanan dan Klaim BPJS/Asuransi lain                               | 12 | Kepala Bagian Perencanaan | Ketidaktepatan dalam melakukan proses Verifikasi dokumen dan koding klaim                                             | Klaim tidak sesuai dengan standar, Citra rumah sakit jelek, Gugatan hukum                                                    |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK terhambat                                                     | 9  | Kepala Bagian Keuangan    | Adanya perubahan regulasi pemberian gaji dan tunjangan ASN                                                            | Pemberian gaji dan tunjangan ASN terlambat                                                                                   |

TABEL 4  
RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

| Tujuan/Sasaran/<br>Program/<br>Kegiatan PD                                                                                    | Indikator Kinerja<br>Tujuan/Sasaran/<br>Program/<br>Kegiatan PD                                                                                  | Pernyataan Risiko                                                                         | Skala<br>Risiko | Sebab                                                                                                      | Dampak                                                                         | Rencana Tindak<br>Pengendalian                                                                              | Penanggungjawab                  | Target Waktu<br>Pelaksanaan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                         | 4               | 5                                                                                                          | 6                                                                              | 7                                                                                                           | 8                                | 9                           |
| Tujuan 1 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                           |                 |                                                                                                            |                                                                                |                                                                                                             |                                  |                             |
| Sasaran :<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Pelayanan<br>kesehatan Primer<br>dan Rujukan di<br>RSUD Prof Dr.<br>Margono Soekarjo | Presentase<br>capaian Standar<br>Pelayanan<br>Minimal                                                                                            | Pelayanan<br>Kesehatan tidak<br>sesuai Standar yang<br>sudah ditetapkan                   | C               | Sarana dan<br>prasarana belum<br>memadai.<br>Jumlah SDM<br>Kesehatan belum<br>terpenuhi sesuai<br>standar. | Mutu pelayanan<br>tidak sesuai<br>standar                                      | Pemenuhan<br>Sarana dan<br>Prasarana<br>pelayanan.<br>Pengembangan<br>dan Peningkatan<br>Kompetensi<br>SDM. | Direktur                         | Semester 2                  |
| Program<br>Pemenuhan<br>Upaya Kesehatan<br>Perorangan &<br>Upaya Kesehatan<br>Masyarakat                                      | Persentase<br>pemenuhan<br>fasilitas upaya<br>kesehatan<br>perorangan dan<br>upaya kesehatan<br>masyarakat<br>RSUD Prof. Dr.<br>Margono Soekarjo | Penyusunan<br>prioritas kebutuhan<br>Sarpras dan<br>Pemenuhan Nilai<br>TKDN belum optimal | UC              | Gagal melakukan<br>pentapisan dan<br>Pengkajian<br>Usulan Sarpras<br>Pelayanan/ Penun-<br>jang Pelayanan   | Pemenuhan<br>Sarpras tidak<br>sesuai dengan<br>target waktu<br>yang ditetapkan | Ketepatan kajian<br>Perencanaan<br>Sarpras & Aldok<br>E Catalog                                             | Wadir Pelayanan<br>dan Kerjasama |                             |
| Kegiatan<br>Penyediaan<br>Fasilitas<br>Pelayanan,<br>Sarana,<br>Prasarana dan<br>Alat Kesehatan                               | Persentase<br>Penyediaan<br>fasilitas<br>Pelayanan,<br>sarana,<br>prasarana dan<br>Alat Kesehatan                                                | Peluang KKN dalam<br>proses pengadaan<br>barangjasa                                       | UC              | Pengadaan<br>barang/jasa<br>berdasarkan<br>komisi yang<br>diberikan kepada                                 | Resiko<br>pemilihan<br>barang tidak<br>sesuai dengan<br>spesifikasi            | Optimalkan<br>Komunikasi<br>Efektif dan<br>Pemanfaatan<br>Sistem IT                                         | Kepala Bidang<br>Pelayanan       |                             |

|                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                     |    |                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (DBHCHT dan DAK)                        | untuk UKP rujukan dan UKM dan UKM Rujukan Tingkat Provinsi daerah                                      |                                                                                     |    | pejabat pengadaan/user                                                                         | standar alat yang ditentukan                                            | justifikasi pemilahan alkes dan kebutuhan lain dilakukan melalui tim pemilihan yang melibatkan semua unsur terkait                                                          |                                  |            |
| Kegiatan Penerbitan ijin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi | Persentase tingkat capaian hasil penilaian akreditasi nasional dan peningkatan tata kelola rumah sakit | Gagal dalam proses mempertahankan status paripurna akreditasi standar kemenkes      | C  | Komitmen dan kepatuhan SDM rumah sakit rendah                                                  | Mutu pelayanan rumah sakit rendah citra rumah sakit buruk               | Monitoring dan evaluasi hasil penilaian akreditasi secara berkala dengan menghadirkan pihak terkait                                                                         | Kepala Bidang Mutu dan Kerjasama | Semester 2 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Kesehatan                                                    | Persentase capaian SDM kesehatan yang terlatih RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                         | Perencanaan jumlah SDM yang akan dilatih tidak berdasarkan analisis gap kompetensi  | C  | Analisis Gap kompetensi tidak dilakukan dengan tepat                                           | Capaian SDM terlatih tidak mencapai target                              | Koordinasi dan kerjasama dengan Penyelenggaraan Pelatihan dan pendidikan                                                                                                    | Wadir Penunjang dan Pendidikan   | Semester 2 |
| Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi     | Jumlah diklat yang dilaksanakan                                                                        | Penyelenggaraan Pelatihan/Pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM | UC | Terbatasnya penyelenggara pelatihan/pendidikan SDM Kesehatan dan Non Kesehatan yang dibutuhkan | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM yang dibutuhkan tidak tercapai | 1. Peningkatan Kapasitas SDM Pelatih dan Narasumber di Rumah sakit<br>2. Digitalisasi dalam Sistem Pembelajaran rumah sakit<br>3. Peningkatan Sarana prasarana pembelajaran | Kepala Bidang Diklat             | Semester 2 |

|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                 |    |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                          |                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                 |    |                                                                                                        |                                                                                                                            | baik teori maupun praktek<br>4. Pembukaan Pelatihan untuk eksternal                      |                         |            |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                                                                         | Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo | Pemenuhan kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat belum efektif            | C  | Kelemahan menetapkan jenis media dan sasaran yang ditetapkan                                           | Target sasaran promosi kesehatan tidak sesuai                                                                              | Melibatkan semua stake holder dan masyarakat dalam menentukan kebutuhan kegiatan promosi | Wadir Umum dan Keuangan | Semester 2 |
| Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan                                                    | Gagal menyediakan media promosi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat | UC | Media elektronik tidak bekerja secara sempurna dan kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak operasional | Promosi melalui media elektronik tidak optimal mencapai target sasaran. Kegiatan promosi dan pemberdayaan tidak terlaksana | Ketepatan Kajian kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat desa dampingan             | Kepala Bagian Umum      | Semester 2 |
| Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di perangkat daerah                                     |                                                                                                                          |                                                                                 |    |                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                          |                         |            |
| Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                               | Mutu Pelayanan kurang optimal                                                   | C  | Kompetensi SDM rendah dan pelayanan tidak profesional/tidak sesuai harapan pelanggan                   | Citra rumah sakit Buruk                                                                                                    | Monitoring dan evaluasi kepatuhan Standar Layanan                                        | Direktur                | Semester 2 |
| Program Penunjang Urusan                                                                                                 | Cost Recovery Rate Total RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo                                                                 | Pendapatan RS belum mampu membiayai seluruh biaya operasional                   | UC | Tingginya biaya operasional rumah sakit karena                                                         | Target Pendapatan Rumah sakit Tidak terpenuhi                                                                              | Manfaatkan TI untuk mengontrol                                                           | Wadir Umum dan Keuangan | Semester 2 |

|                                                                      |                                                                          |                                                                            |    |                                                                              |                                                                           |                                                                                                            |                           |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| Pemerintah Daerah Provinsi                                           |                                                                          | rumah sakit baik Anggaran BLUD maupun APBD                                 |    | perubahan kebijakan dan perubahan harga/pembiayaan dan lambatnya klaim       |                                                                           | Belanja dan pendapatan                                                                                     |                           |            |
| Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | Cost Recovery Rate (CRR) Parsial                                         | Risiko terjadinya Fraud pada Proses pelayanan dan Klaim BPJS/Asuransi lain | C  | Ketidaktepatan dalam melakukan proses Verifikasi dokumen dan koding klaim    | Klaim tidak sesuai dengan standar, Citra rumah sakit jelek, Gugatan hukum | Peningkatan kepatuhan dalam kelengkapan data dan proses verifikasi yang tepat                              | Kepala Bagian Perencanaan | Semester 2 |
| Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah                      | Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK terhambat                       | UC | Adanya perubahan regulasi pemberian gaji dan tunjangan ASN                   | Pemberian gaji dan tunjangan ASN terlambat                                | Peningkatan kerjasama dengan Bank Jateng untuk pembayaran gaji dan tunjangan sesuai waktu yang ditetapkan. | Kepala Bagian Keuangan    | Semester 2 |
| Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah | Indeks Manajemen Risiko                                                  | Penyusunan register risiko RS kurang tepat                                 | UC | Penyusunan Register risiko tidak melibatkan semua unsur di dalam rumah sakit | Tindak pengendalian Risiko tidak tepat sasaran                            | Monitoring dan Evaluasi terhadap implementasi Rencana tindak Pengendalian yang sudah ada                   | Direktur                  | Semester 2 |